

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
Periode Penerapan : 2022

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi	Kurangnya Pemahaman pegawai terkait reformasi birokrasi
		Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja
		Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di Kantor Wilayah	Belum optimalnya penerapan <i>reward and punishment</i>
2	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Penyebaran informasi Layanan Izin Keimigrasian	Kesadaran penjamin dalam melaporkan izin tinggal orang asing belum optimal
3	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat Memenuhi Target	Pergantian operator disetiap kabupaten/kota
4	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Memastikan pelayanan publik di bidang pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Pelayanan Hukum	Menurunnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat terkait Pelayanan AHU di Masa Pandemi Covid 19
5	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Riset	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan kementerian Hukum dan HAM	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengisian survei IPK-IKM

6	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sub Bidang KI	Menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
7	Penyelenggaraan Produk Hukum di Wilayah	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentase rancangan Perda yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	Kurangnya Koordinasi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi perda ke kanwil Maluku Utara.
8	Penyelenggaraan pemasyarakatan di Wilayah	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	Hasil Monev Bintorwasdal menemukan masih adanya tahanan / napi yang <i>overstaying</i>
9	Penyelenggaraan pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Hasil Monev Bintorwasdal terhadap dukungan Sarana dan Prasarana kegiatan pencegahan, penegakkan keamanan dan ketertiban yang belum optimal.



Terdate, 31 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

M. Adnan
NIP.19650709 198603 1 002

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
 Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Reformasi	Kurangnya Pemahaman pegawai terkait reformasi birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait pemenuhan data dukung RB kurang sesuai dengan ketentuan	Kanwil Kemenkumham Maluku Utara	Kurangnya informasi kepada pegawai terkait reformasi birokrasi	Internal	C	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tidak tercapai	Kementerian	Pendampingan pemenuhan data dukung reformasi birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait pemenuhan data dukung RB kurang sesuai dengan ketentuan	Risiko Operasional
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja, disbursement plan dan rencana umum pengadaan	Kanwil Kemenkumham Maluku Utara	Perubahan jadwal kegiatan karena kebijakan pimpinan dan Adanya kegiatan dari pusat yang bersamaan	Internal	C	Nilai IKPA dan SMART tidak maksimal	Kementerian	Koordinasi dengan Unit Eselon I	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja, disbursement plan dan rencana umum pengadaan	Risiko Operasional
3	Indeks kepuasan layanan internal di	Belum optimalnya penerapan reward and punishment	Rendahnya semangat bekerja dan kedisiplinan pegawai	Kanwil Kemenkumham Maluku Utara	Tidak terimplementasikan SK reward and punishment	Internal	C	Semangat kerja dan kedisiplinan pegawai belum optimal	Kementerian	Penerapan SK	Rendahnya semangat bekerja dan kedisiplinan pegawai	Risiko Reputasi
4	Penyebaran informasi Layanan Izin Keimigrasian	Kesadaran penjamin dalam melaporkan izin tinggal orang asing belum optimal	Penyebaran Layanan Informasi Keimigrasian kurang maksimal	Kantor Wilayah	Kurang optimalnya kesadaran penjamin terhadap peraturan keimigrasian kurang optimal	External	C	Tidak Tersampainya Layanan Informasi Keimigrasian Kepada Stakeholder	Kementerian	Bindalwasnis Penyebaran informasi layanan izin keimigrasian kepada masyarakat dan pihak penjamin	Penyebaran Layanan Informasi Keimigrasian kurang maksimal	Risiko Operasional
5	Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat Memenuhi Target	Pergantian operator disetiap kabupaten/kota	Keterlambatan data, terbatasnya SDM dan anggaran diklat operator	Kantor Wilayah	Kurangnya pemahaman setiap kabupaten terkait penggunaan aplikasi aksi HAM Daerah	Eksternal	C	Tidak tercapainya pelaporan aksi HAM dari pemerintah daerah	Kementerian	Pelatihan aplikasi aksi HAM kepada operator di setiap kabupaten/kota	Keterlambatan data, terbatasnya SDM dan anggaran diklat operator	Risiko Kepatuhan
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Pelayanan Hukum	Menurunnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat terkait Pelayanan AHU di Masa Pandemi Covid 19	terjadinya penurunan IKM terhadap Bidang Pelayanan Hukum dikarenakan lambatnya pelayanan pada masa pandemi covid 19, dan belum tersedianya fasilitas terhadap kelompok rentan di kantor wilayah.	Kantor Wilayah	Kecepatan pelayanan yang menurun dikarenakan Pelayanan menjadi lebih lambat pada masa pandemi covid-19 serta fasilitas terhadap penyandang disabilitas pada kantor wilayah yang belum memadai.	Eksternal	C	Terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di kantor wilayah	Kantor Wilayah, Bidang Pelayanan Hukum	Kanwil mengoptimalkan kecepatan pelayanan dengan mengakhiri masa <i>work from home</i> (WFH), kantor wilayah berupaya menyediakan sarana kepada penyandang disabilitas untuk mempermudah aktivitas pelayanan di kantor wilayah	Terjadinya penurunan survey IKM terhadap kantor wilayah terkait pelayanan publik di Bidang Pelayanan Hukum	Risiko Reputasi

7	Presentasi rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengisian survei IPK-IKM	Kurang maksimalnya pengambilan data di UPT Pas dan Imigrasi jajaran kantor wilayah	Kantor Wilayah	Masyarakat tidak memahami pengisian survei IPK-IKM	Eksternal	C	Tidak maksimalnya penyampaian laoran kegiatan hasil survei IPK-IKM	Kementerian	Tata cara memberikan informasi berupa brosur/pamflet terkait pelayanan publik di bidang HAM	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang HAM	Risiko Reputasi
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sub Bidang KI	Menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Penurunan Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Sub Bidang Kekayaan Intelektual	Kantor Wilayah dalam hal ini Bidang Pelayanan Hukum	Menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Internal	C	Tidak maksimalnya penyampaian laporan kegiatan hasil survei IPK-IKM	Kementerian	Pemberian informasi berupa brosur/pamflet terkait pelayanan publik kekayaan intelektual	Penurunan nilai survei IKM terhadap layanan publik kekayaan intelektual	Risiko Reputasi
9	Presentase rancangan Perda yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	Kurangnya Koordinasi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi perda ke kanwil Maluku Utara.	Menurunnya harmonisasi rancangan peraturan daerah	Kanwil Maluku Utara	Kurangnya pemahaman pemerintah daerah tentang prosedur pengharmonisasian ranperda sesuai UU no.15 thn 2019	Eksternal	UC	Tidak dapat diusulkan meraih predikat WBK	Kementerian	Memberikan informasi kepada Pemerintah daerah berupa petunjuk teknis prosedur pengharmonisasian ranperda	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Risiko Reputasi
10	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	Hasil Monev Bintorwasdal menemukan masih adanya tahanan / napi yang overstaying	Belum optimalnya penanganan <i>overstaying</i>	Divisi Pemasarakatan	Adanya keterlambatan surat perpanjangan penahanan	Eksternal	C	Terjadinya overstaying pada Lapas / Rutan	Kementerian	Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait	Belum optimalnya penanganan overstaying	Risiko Operasional
11	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Hasil Monev Bintorwasdal terhadap dukungan Sarana dan Prasarana kegiatan pencegahan, penegakkan keamanan dan ketertiban yang belum optimal.	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan	Divisi Pemasarakatan	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengamanan	Internal	C	Penyelundupan, peredaran dan pengendalian Narkoba dalam Lapas/Rutan oleh WBP, penyeludupan senjata tajam, Handphone dan barang-barang terlarang dan berbahaya lainnya, terjadinya kerusuhan dan delirian WBP.	Kementerian	Melakukan pengegedahan dan pengendalian pengamanan baik secara rutin maupun insidental.	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan	Risiko Reputasi


 Ternate, 31 Januari 2022
 Kepala Kantor Wilayah
 M. Adnan
 NIP.19650709 198603 1 002

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 x 7	9
1	Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait pemenuhan data dukung RB kurang sesuai dengan ketentuan	Hampir Pasti	4	Kurangnya informasi kepada pegawai terkait reformasi birokrasi	Kementerian	5	20	Tinggi
2	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja, disbursement plan dan rencana umum pengadaan	Hampir Pasti	4	Perencanaan kegiatan tidak memperhatikan kalender kerja	Kementerian	5	20	Tinggi
3	Rendahnya semangat bekerja dan kedisiplinan pegawai	Pasti	5	Kurang diperhatikan terkait pemberian reward and punishment	Kementerian	3	15	Sedang
4	Penyebaran Layanan Informasi Keimigrasian kurang maksimal	Moderate	3	Kurangnya pemahaman penjamin dalam hal informasi keimigrasian	Kementerian	5	15	Sedang
5	Keterlambatan data, terbatasnya SDM dan anggaran diklat operator	Hampir pasti	4	Pemahaman operator memengaruhi pelaporan aksi HAM di daerah	Kementerian	5	20	Tinggi
6	Terjadinya penurunan survey IKM terhadap kantor wilayah terkait pelayanan publik di Bidang Pelayanan Hukum	Kecil	2	Pelayanan menjadi lambat saat masa pandemi	Kementerian	3	6	Rendah
7	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang HAM	Moderat	3	Kurangnya sosialisai dengan masyarakat yang berada di kabupaten sesuai dengan wilayah kerja	Kementerian	5	15	Sedang
8	Penurunan nilai survei IKM terhadap layanan publik kekayaan intelektual	Kecil	2	Menurunnya kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat	Kementerian	3	6	Rendah
9	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Moderat	3	Jumlah harmonisasi produk hukum daerah menurun	Kementerian	5	15	Sedang
10	Belum optimalnya penanganan overstaying	Moderat	3	Terjadinya peningkatan kuantitas tahanan/narapidana	Kementerian	5	15	Sedang
11	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan	Kecil	2	Belum optimalnya sistem deteksi dalam penanganan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan	Kementerian	5	10	Rendah



Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham
Maluku Utara

M. Adnan
NIP.19650709 198603 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara
 Nomor : W29- 401 .PW.03.02
 Tanggal : 31 Januari 2022
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah

INDIKATOR RISIKO						
Unit Pemilik Risiko		: Kanwil Kemenkumham Maluku Utara				
Periode Penerapan		: 2022				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait pemenuhan data dukung RB kurang sesuai dengan ketentuan	20	3	15	Persentase pegawai yang kurang menerima informasi terkait reformasi birokrasi	70%
2	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kalender kerja, disbursement plan dan rencana umum pengadaan	20	1	15	Persentase kegiatan di Kantor Wilayah yang tidak fokus pada <i>disbursement plan, procurement plan</i> dan kalender kerja	60%
3	Rendahnya semangat bekerja dan kedisiplinan pegawai	15	6	12	Persentase pemberian <i>reward and punishment</i>	60%
4	Penyebaran Layanan Informasi Keimigrasian kurang maksimal	15	7	10	Persentase rendahnya pemahaman penjamin terkait informasi keimigrasian	60%
5	Keterlambatan data, terbatasnya SDM dan anggaran diklat operator	20	2	15	Persentase operator di setiap kabupaten/kota yang kurang memahami aplikasi aksi HAM	60%
6	Terjadinya penurunan survey IKM terhadap kantor wilayah terkait pelayanan publik di Bidang Pelayanan Hukum	6	11	3	Persentase layanan publik di bidang pelayanan hukum	60%
7	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang HAM	15	5	10	Persentase masyarakat yang tidak memahami pengisian survei IPK-IKM	60%
8	Penurunan nilai survei IKM terhadap layanan publik kekayaan intelektual	6	10	3	Persentase menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	60%
9	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap produk hukum daerah	15	4	10	Persentase menurunnya pelaksanaan harmonisasi Ranperda	60%
10	Belum optimalnya penanganan overstaying	15	8	10	Persentase jumlah UPT yang memberikan pelayanan	60%
11	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas/Rutan	10	9	5	Persentase terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan	60%



Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara

M. Achran
 NIP. 19650709 198603 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara
 Nomor : W29- 401 .PW.03.02
 Tanggal : 31 Januari 2022
 Tentang : Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian
 Hukum dan HAM Maluku Utara

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
 Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pegawai yang kurang menerima informasi terkait reformasi birokrasi	70%	Mengurangi kemungkinan risiko	Coaching dan mentoring Pendampingan pemenuhan data dukung reformasi birokrasi	Laporan Pendampingan pemenuhan data dukung reformasi birokrasi	3	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
2	Persentase kegiatan di Kantor Wilayah yang tidak fokus pada disbursement plan, procurement plan dan kalender kerja	60%	Mengurangi Dampak Risiko	Pelaksanaan kegiatan sesuai disbursement plan dan Kalender Kerja	Laporan monev anggaran dan kegiatan	1	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
3	Persentase pemberian reward and punishment	60%	Mengurangi Dampak Risiko	Melaksanakan monev internal penerapan SK reward and punishment secara berkala	Laporan Monev internal pemberian reward dan punishment	2	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
4	Persentase rendahnya pemahaman penjamin terkait informasi keimigrasian	60%	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi keimigrasian secara berkala	Laporan hasil kegiatan	2	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
5	jumlah operator di setiap kabupaten/kota yang kurang memahami aplikasi aksi HAM	60%	mengurangi kemungkinan resiko	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan aksi HAM daerah	Laporan Koordinasi	2	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
6	Pelayanan Lambat Karena Kebijakan WFH dimasa Pandemi; Ketersedian Sarana Prasarana untuk Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.	60%	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Kantor wilayah melakukan pelayanan secara online untuk mengefisienkan waktu pelayanan. Serta menyiapkan sarana untuk penyandang disabilitas	Laporan Sosialisasi, Notula, Dokumentasi	2	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
7	merurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang HAM	60%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Penguatan layanan dan pengisian survei	Laporan Penguatan Layanan dan Pengisian survei	4	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
8	Penurunan Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	60%	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	Meningkatkan Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat dengan meningkatkan intensitas dan kualitas layanan Kekayaan intelektual	Data pada aplikasi Balitbangkumham	4	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	

9	Menurunnya angka persentase harmonisasi ranperda	60%	Mengurangi kemungkinan resiko	Koordinasi dengan pemda terkait pengharmonisasian Ranperda	Laporan hasil koordinasi	3	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
10	Persentase jumlah UPT yang memberikan pelayanan	60%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Melakukan sosialisasi dalam peningkatan layanan masyarakat	Laporan sosialisasi	2	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	
11	Persentase terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan	60%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Melaksanakan pengawasan melekat pada Lapas/Rutan	Laporan pengawasan	2	Januari s-d Desember	Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara	



Ternate, 31 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah

M. Adnan
NIP.19650709 198603 1 002